

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN AIRMADDIDI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Oleh: Eka Marjuanti
Univeritas Klabat, Sulawesi Utara

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of the Village Fund Allocation in District Airmadidi North Minahasa Regency, as well as contributing factors and obstacles affecting the implementation and the strategy that should be done within the framework of the successful implementation of the policy but it also will provide recommendations to the local government in the management of Allocation Village fund. The method used in this research is qualitative descriptive method, where the main instrument in the study is the researchers themselves. Sources of data used is the source of primary data and secondary data relating to the circumstances of empirical implementation of the Policy. The results showed that the implementation of the policy of the Village Fund Allocation (ADD) in the district of Minahasa Utaraberjalan Airmadidi quite smoothly. However, if it is linked to the achievement of objectives, the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in the District of North Minahasa Regency Airmadidi not optimal. Some of the factors that affect the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in District Airmadidi North Minahasa Regency is communication, resource capabilities, attitudes executor, bureaucratic structure, and the size and environmental policy objectives. Keywords: Policy Implementation, Village Fund Allocation, Airmaddidi, North Minahasa regency

Latar Belakang

Program Desa Adalah Suatu Strategi Pembangunan Yang Merupakan Perkembangan Lebih Lanjut Dari Strategi Pembangunan Desa. Dalam Pembangunan Desa Dilakukan Usaha Intensif Dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa. Dengan logika bahwa desa maju maka kecamatan maju, kecamatan maju maka kabupaten secara keseluruhan akan maju. Pelaksanaan kebijakan Program Desa secara umum dilatar belakangi oleh minimnya pembangunan dan pemberdayaan serta dominasi fenomena kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Berangkat dari kondisi yang demikian, kini desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat.

Satu diantara rentetan program pemberdayaan itu adalah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat.

Di Minahasa Utara, dengan sumberdaya alam yang tergolong sangat banyak seperti terdapat tanaman pala dan juga kelapa, namun keadaan sumber daya manusia yang belum memadai sehingga memperhambat produktivitas dan daya saing.

Selanjutnya berdasar identifikasi masalah dalam efektivitas Alokasi Dana Desa dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu a. Mengapa Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara kurang berhasil? b. Apa saja fenomena yang mempengaruhi implementasi alokasi dana desa?

Kajian Teoretis

Pengertian Kebijakan Publik

James E. Anderson mendefinisikan kebijaksanaan itu adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set in dealing with a problem matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan menutut George C. Edward III dan Ira Sharkansky memiliki pendapat yang hampir sama dengan Thomas R. Dye mengenai kebijakan publik, yaitu “*...is what government say to do or not to do, it is goals or purposes of government program...*” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah...).

Implementasi Kebijakan

Komponen secara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan dan bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk, 1994:15).

Implementasikebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980).

Sedangkan George C Edward III (Subarsono, 2005) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Metode Penelitian

Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Airmadidi. Oleh karena merupakan penggambaran dari sebuah fenomena, maka penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi mengacu pada pendapat Moleong (2005 : 5), yang mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau

pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus". Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Pendekatan Fenomenologi bertujuan memahami respon atas keberadaan manusia atau masyarakat, serta pengalaman yang dipahami dalam berinteraksi (Saladien, 2006). Para fenomenolog percaya bahwa "pada makhluk hidup, tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan pengalaman melalui interaksi dengan orang lain" (Moleong, 2005:18). Oleh karena itu fenomenologis disini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Stake holder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan mereka. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan semakin dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada. Dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan ADD ternyata pihak-pihak yang dilibatkan belum bisa mewakili untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat, hal ini terjadi karena dalam rapat ternyata mereka dihadirkan untuk melegitimasi yang sebelumnya merupakan keinginan dari pemerintah desa dan beberapa elit desa saja. Hal ini tentunya berakibat pada perencanaan yang dihasilkan tidak partisipatif karena tidak mencerminkan keinginan masyarakat desa secara umum di desa melainkan keinginan atau kepentingan pihak pemerintah desa dan para elit desa. Dengan tidak terwakilinya kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dalam penentuan kebijakan penggunaan ADD sehingga dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan pengenggaran ADD di kelurahan Airmadidi dapat dikatakan belum berjalan sesuai dengan tataran penentuan perencanaan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa di kelurahan Airmadidi terkesan lambat dan tidak tepat waktu baik dalam pengajarannya maupun penyelesaiannya sehingga memperlambat proses laporan pertanggung jawaban anggaran Alokasi Dana

Desa, hal ini disebabkan karena proses pencairan anggaran alokasi dana desa yang lambat dari pemerintah Kabupaten.

Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa

Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Airmadidi, yaitu Pertama peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. Kedua peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp.288.523.000,- dari Total anggaran Alokasi Dana. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan atau perintah kebijakan-nya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. Kelengkapan sarana atau prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD

kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD disemua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah

- a. Adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD.
- b. Sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD.
- c. Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD.

Hubungan Ukuran dan Tujuan Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD.

Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada

yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa masih mengalami beberapa kekurangan antara lain dalam Penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kelurahan Airmaddidi tidak melibatkan perwakilan dari masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa. Dalam proses pelaksanaan kegiatan masalah yang timbul adalah lamanya proses pencairan dan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten. Sehingga membuat proses pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik yang telah dianggarkan sebelumnya terkesan lambat dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. Pertanggung jawaban pengelolaan alokasi Dana Desa di kelurahan Airmadidi dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dikelurahan Airmadidi belum terwujud
2. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berjalan cukup lancar. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Airmadidi adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Daftar Pustaka

- Burhan, Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Prenada Meda Group, Jakarta.
- Budi Winarno, Ph.D, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Dye Thomas R, *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Renhart & Winston, 1981..
- Gibson, Ivanovich, Donnely, 1989, *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.

- Hessel, Nogi S. Tangkilisan, Drs, M.Si, *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2003.
- Islamy, M. Irfan, DR, MPA, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta, 1997.
- Moloeng, Lexy. J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mar'at., *Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Robbins, Stephen P, Perilaku Organisasi, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta, 2006.
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Subarsono, AG, Drs, M.Si, MA, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Steers, Ricard M., (terjemahan), 1985, *Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975, *The Policy Implementation Process : A Concentual Framework in : Administration and Society*, Vol.6 No. 4 p. 445-485.
- Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, rineka Cipta, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, *Good Governance* (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), UI Press, Jakarta.
- Pranarka, dan Priyono, Onny 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, Centre for Strategic and International Studies*, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.